



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamankan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban menyusun Dokumen Renstra.

Penyusunan Renstra ini telah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau

Renstra ini merupakan dokumen yang sangat penting, yang akan digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai bentuk implementasi asas akuntabilitas kinerja. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran, dan saran dalam penyusunan Renstra ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat meningkatkan kinerja lembaga, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau ke depan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan terpadu. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	21
2.2.1. Kepegawaian	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	38

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.2.1. Visi	39
3.2.2. Misi	43
3.3. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	46
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	48
3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5. Penentuan Isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	57
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	81
BAB VIII PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Distribusi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	22
Tabel 2. 2. Tingkat pendidikan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	23
Tabel 2. 3. Saranan dan Prasaranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	24
Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kepulauan Riau.....	30
Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	34
Tabel 2. 6. Tantangan dan Peluang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	35
Tabel 3. 2. Identifikasi Permasalahan	38
Tabel 3. 3. Identifikasi Masalah Terhadap Visi dan Misi	44
Tabel 3. 4. Identifikasi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	46
Tabel 3. 5. Identifikasi Masalah Rencana Tata Ruang.....	51
Tabel 3. 6. Telaah Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan	53
Tabel 3. 7. Identifikasi Terhadap KLHS.....	54
Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	58
Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	64
Tabel 6. 1. Program Kerja, Kegiatan / Output, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	70

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	
RPJMD	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen yang menjadi rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang dilimpahkan kepada OPD dimaksud. Sebagai dokumen perencanaan, setidaknya Renstra berfungsi menjadi pedoman oleh OPD dalam menjalankan fungsi-fungsinya.



Secara umum Renstra Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni: Kemana pelayanan OPD akan di arahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan OPD dapat tercapai.

Secara terperinci, penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra haruslah disusun berdasarkan pada program-program dan kegiatan-kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*). Disamping itu, Renstra akan

menjadi pijakan dalam penyusunan dokumen rencana kerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi bertujuan untuk memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik berupa sumber daya manusia dan potensi-potensi lainnya. Hal ini guna mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman.

Sedangkan secara khusus, penyusunan Renstra bertujuan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Disamping itu, Renstra juga memuat dan menetapkan program-program serta sasaran kerja yang terarah, terukur dan sekaligus menjadi pedoman untuk masa lima tahun yang akan datang. Lain daripada itu, Renstra juga harus mampu memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi) serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk jangka 2021-2026, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau juga memuat telaahan atas rencana strategis pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus menjadi rujukan atas kebijakan nasional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau serta telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Provinsi sebagai rujukan penggunaan ruang wilayah dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.

Oleh karena itu maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini selanjutnya akan menjadi pedoman dan sekaligus rujukan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan.
14. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kepulauan Riau.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1).
22. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
23. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, Nomor 781).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun untuk mensinergikan dokumen perencanaan serta dinamika dan aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat dengan Program Strategis Nasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu penyusunan dokumen Renstra ini juga memuat Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai OPD Teknis yang menangani bidang lingkungan dan kehutanan yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.



1.3.2. Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- 1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terperinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan hingga Tahun 2026 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran dan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 2) Mengakomodir adanya re-desain kelembagaan yang menyesuaikan dengan dinamika isu-isu pembangunan bidang sarana dan prasarana dalam rencana pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan tahun 2026.

- 3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi dalam pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- 4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja dilingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun



2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi dalam bidang lingkungan hidup melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 361 sebagaimana berikut: ayat (1). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Selanjutnya ayat (2) dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaataan Hasil Hutan ;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaataan Hasil Hutan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaataan Hasil Hutan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaataan Hasil Hutan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

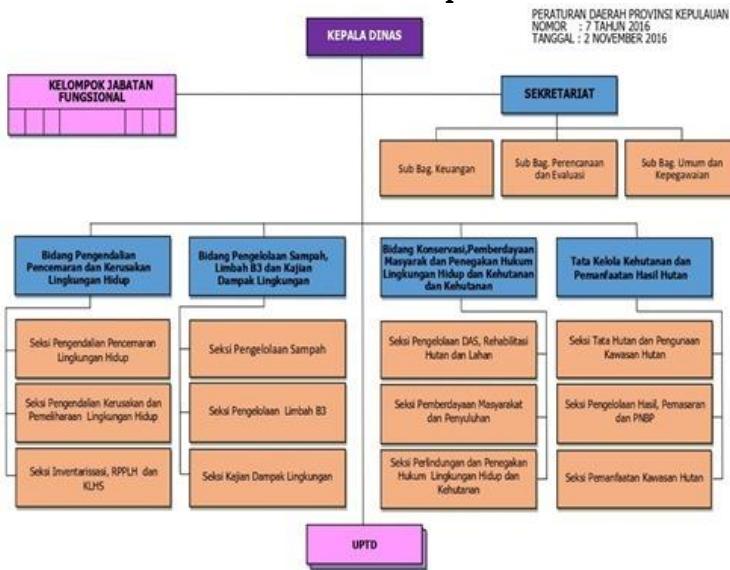
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- 6) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan;
- 8) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- 9) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Tata Kelola Kehutanan Dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Lebih lanjut tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didistribusikan ke seluruh unit

kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. Berikut gambar struktur organisasi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau:

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Pada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana gambar diatas maka dapat diketahui bahwa OPD tersebut memiliki 4 bidang dan 1 Sekretariat, serta 1 kelompok jabatan fungsional tertentu. Struktur tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bergerak dalam urusan kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semua program dan kegiatan telah tertampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/bagian dalam mencapai target

kinerja organisasi. Berikut uraian tugas dan fungsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis di sub bagian umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga dinas;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program; dan
- e. Pelaksaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan inventarisasi RPPLH dan KLHS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian dampak Lingkungan;
- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan,

penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan sampah;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan limbah B3;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kajian Dampak Lingkungan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan;

- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan, dan perlindungan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan DAS;
 - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan;
 - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai rincian tugas:
- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung di wilayah Provinsi;
- f. Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
- g. Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;

- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu

Selanjutnya dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, selain dilaksanakan oleh struktur organisasi yang ada pada Dinas, tugas-tugas tersebut juga dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD. Ketujuh UPT tersebut adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit I Karimun, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit III Lingga, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjungpinang, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Natuna, dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VI Anambas.

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup, sedangkan untuk UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Guna mengetahui tugas masing-masing UPT tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tugas tersebut, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengujian dan menganalisis secara laboratorium seluruh komponen lingkungan.
- 2) Pelaksanaan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu lingkungan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan.
- 5) Pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan.
- 6) Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium lingkungan rujukan.
- 7) Pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratorium.
- 8) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.

Guna menjalankan tugas tersebut UPT KPH memiliki fungsi yang diatur dalam peraturan Gubernur No 52 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;

- 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- 5) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH;
- 8) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
- 9) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- 10) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- 11) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
- 12) Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dengan 3 kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas atau THL. Jumlah keseluruhan pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 198 pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari pejabat eselon sebanyak 34 orang, staf PNS sebanyak 102 orang, staf PTT sebanyak 19 orang dan staf THL sebanyak 43 orang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki pejabat fungsional tertentu. Pejabat fungsional tertentu tersebut adalah Polisi Kehutanan sebanyak 40 orang, Pengendali Dampak Lingkungan

sebanyak 3 orang. Berikut tabulasi kondisi pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Jumlah tersebut selanjutnya terdistribusi di Kantor Dinas dan juga di Unit Pelaksana Teknis dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Distribusi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Bidang	Pejabat Eselon	Staf PNS	Staf PTT	Staf THL	Jumlah
1	2	4	5	6	7
Sekretariat	5	11	7	9	32
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4	6	2	3	15
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan	4	7	4	4	19
Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kehutanan	2	5	1	2	10
Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	4	6	2	3	15
UPT Laboratorium	0	3	3	6	12
UPTD KPHL Batam	3	12	0	7	22
UPTD KPHP Karimun	3	2	0	2	7
UPTD KPHP Lingga	1	2	0	2	5
UPTD KPHP Natuna	4	6	0	2	12
UPTD KPHP Tanjungpinang - Bintan	3	14	0	3	20
UPTD KPHP Anambas	1	20	0	0	21
Gakkum	0	8	0	0	8
JUMLAH	34	102	19	43	198

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Jika dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2. 2. Tingkat pendidikan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tingkat Pendidikan	PNS	PTT	THL	Jumlah
	(Orang)	(Orang)	(Orang)	
1	2	3	4	5
S3/Doktor	1	0	0	1
S2 / Master	10	0	0	11
S1 / Sarjana	56	11	11	78
D3 / Sarjana Muda	6	1	2	9
SMA / sederajat	63	7	30	100
SMP / sederajat	0	0	0	0
SD / sederajat	0	0	0	0
JUMLAH	136	19	43	198

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Berikut informasi pegawai berdasarkan gender dan golongan;

Tabel 2. 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

GOLONGAN RUANG	JUMLAH			TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	4	
1	2	3	4	
IV/c	0	0	0	0
IV/b	5	0	0	5
IV/a	7	0	0	7
III/d	18	4	0	22
III/c	9	9	0	18
III/b	21	6	0	27
III/a	3	4	0	7
II/d	35	7	0	42
II/c	1	2	0	3
II/b	4	0	0	4
II/a	1	0	0	1
PTT	11	8	0	19
THL	28	15	0	43
JUMLAH	143	55	198	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari bangunan kantor dinas, bangunan Kantor UPT yang tersebar di 7 kabupaten/ kota. Selain bangunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki Laboratorium Lingkungan yang berada di Sekupang Kota Batam. Selain itu juga tersedia kendaraan roda 2, 4, dan 6, alat bengkel, kebun, jalan hutan, alat kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan komunikasi.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan dinas sudah cukup memenuhi. Namun demikian masih terdapat beberapa sarpras yang harus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Diantara sarpras yang perlu ditingkatkan kuantitasnya adalah alat pemadam kebakaran hutan dan alat pemantau kualitas udara (AQMS). Sedangkan untuk sarpras yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah kendaraan bermotor roda 2 yang digunakan untuk operasi hutan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan yang memadai serta ada beberapa sarpras yang membutuhkan perawatan dan perbaikan. Diantara sarpras Laboratorium Lingkungan yang perlu ditingkatkan jumlahnya adalah lemari asam, AAS (*Atomic Absortion Spectrophotometer*) dan Spectrophotometer.

Tabel 2. 3. Saranan dan Prasaranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
1	AAS Attachment for HG Determination and 16 Lamp	1	Baik
2	AC Split	4	Baik
3	AC Unit	9	Baik
4	Air Conditioning Unit	7	Baik
5	Alat Dapur Lain-lain	30	Baik

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
6	Alat Destilasi Air	1	Baik
7	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	1	Baik
8	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	4	Baik
9	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	4	Baik
10	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	69	Baik
11	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	55	Baik
12	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	35	Baik
13	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	Baik
14	Alat Pendingin Lain-lain	2	Baik
15	Alat Penggilingan Padi	1	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
17	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	2	Baik
18	Alat Penyimpanan Lain-lain	1	Baik
19	Alat Peraga Bahasa Indonesia Lain-lain	1	Baik
20	Alat Perlindungan Lain-lain	61	Baik
21	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Baik
22	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
23	Amplifier	1	Baik
24	Anemometer	1	Baik
25	Anemometer Portable Digital	1	Baik
26	Audio Tape Reel Recorder	1	Baik
27	Automatic Timer	1	Baik
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Baik
29	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	1	Baik
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Baik
31	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1	Baik
32	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	Baik
33	Beaker	1	Baik
34	Botol	100	Baik
35	Botol Pencuci	1	Baik
36	Botol Plastik	20	Baik
37	Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain	1	Baik
38	Buku Umum Lain-lain	6	Baik
39	Burette	22	Baik
40	Camera + Attachment	4	3 (Baik), 1 (Kurang Baik)
41	Camera Electronic	15	Baik
42	Camera Photo Micrograph	1	Baik
43	Camera Video	2	1 (Baik), 1 (Kurang Baik)

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
44	Cardiac Output	110	Baik
45	Cawan Petri	20	Baik
46	Cawan Porselin	20	Baik
47	CCTV	8	Baik
48	Conductimeter	3	Baik
49	Conductivity Meter	3	Baik
50	Container		Baik
51	CPU	2	Baik
52	Daun Pintu Alumunium	5	Baik
53	Dinding/Sekat Besi	2	Baik
54	Dinding/Sekat Gypsum	1	Baik
55	Dinding/Sekat Kayu	238	Baik
56	DO Meter	8	Baik
57	Dry Type Gas Meter	1	Baik
58	Dump Truck	6	Baik
59	Elektroda Tembaga (Voltameter)	6	Baik
60	Emergency Kit	1	Baik
61	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	14	Baik
62	Erlenmeyer Plastik	26	Baik
63	Exhaust Fan	4	Baik
64	Filling Besi/Metal	21	Baik
65	Filter	3	Baik
66	Filtration Unit	1	Baik
67	Garu	18	Baik
68	Gas Sampler	2	Baik
69	Gedung Pos Jaga Permanen	7	Baik
70	Global Positioning System (GPS)	37	Baik
71	Gordyn	3	Baik
72	Handphone	2	Baik
73	Handy Talky	2	Baik
74	Handycam	2	Baik
75	Harddisk Internal	4	Baik
76	High Volum Air Sampler	1	Baik
77	Hot Plate Stirrer	1	Baik
78	Hub	3	Baik
79	Ilmu Pengetahuan umum	165	Baik
80	Instrument Probe/Sensor Lain-lain	2	Baik
81	Instrument Tray	5	Baik

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
82	Jeep	1	Baik
83	Kabel Listril	2	Baik
84	Kaca Riben	5	Baik
85	Karpet	3	Baik
86	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Baik
87	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	3	Baik
88	Keyboard	1	Baik
89	Kompas	10	Baik
90	Konstruksi Pagar	1	Baik
91	Kursi Biasa	31	Baik
92	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
93	Kursi Kerja	65	Baik
94	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Baik
98	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9	Baik
99	Kursi Rapat	58	Baik
100	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	30	Baik
101	Kursi Tamu	1	Baik
102	Labu Takar	23	Baik
103	Lain-lain	1	Baik
104	Lap Top	35	Baik
105	Layar Proyektor	3	Baik
106	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	13	11 (Baik), 2 (Kurang Baik)
107	Lemari Asam	1	Baik
108	Lemari Besi	1	Baik
109	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	Baik
110	Lemari Es	3	Baik
111	Lemari Kayu	9	Baik
112	Lemari Pakaian	1	Baik
113	Lemari Penyimpanan	18	Baik
114	Loudspeaker	2	Baik
115	Magnetic Stripes & Bars	6	Baik
116	Masker Oksigen	15	Baik
117	Meja Besi/Metal	15	Baik
118	Meja Biro	16	Baik
119	Meja Kayu/Rotan	37	Baik

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
120	Meja Kerja	21	Baik
121	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	6 (Baik), 1 (Kurang Baik)
122	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
123	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik
124	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8	Baik
125	Meja Makan	1	Baik
126	Meja Panjang	2	Baik
127	Meja Rapat	3	Baik
128	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Baik
129	Mesin Absensi	1	Baik
130	Mesin Jahit	7	Baik
131	Mesin Ketik Listrik Portable	1	Baik
132	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Baik
133	Mesin Pompa Air	2	Baik
134	Microphone	11	Baik
135	Modem	1	Baik
136	Monitor	1	Baik
137	Mouse	4	Baik
138	Multi Chanel Analyser	1	Baik
139	Neraca Dengan Digital Display	1	Baik
140	Note Book	31	30 (Baik), 1 (Kurang Baik)
141	P.C Unit/ Komputer PC	71	Baik
142	Pakaian Panas/Lengkap	7	Baik
143	Papan Nama Instansi	17	Baik
144	Papan Pengumunan	1	Baik
145	Peralatan Jaringan Lain-lain	16	Baik
146	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Baik
147	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1	Baik
148	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	8	Baik
149	Personal Komputer Lain-lain	2	Baik
150	Pesawat Telephone	1	Baik
151	PH Meter	7	Baik
152	Pick Up	4	Baik
153	Plankton Net	2	Baik
154	Ploter	2	Baik
155	Pocket Altimeter	1	Baik
156	Power Supply	2	Baik
157	Power Supply Microphone	1	Baik

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
158	Printer	82	78 (Baik), 4 (Kurang Baik)
159	Proyektor + Attachment	6	Baik
160	Rak Kayu	4	Baik
161	Rak-rak Penyimpanan	2	Baik
162	Refractometer	1	Baik
163	Remote Control Unit	1	Baik
164	Rol Meter	2	Baik
165	Router	1	Baik
166	Scanner	2	Baik
167	Sedan	3	Baik
168	Selang Penyemprot Air	13	Baik
169	Sepatu (International Safety Tester)	35	Baik
170	Sepeda Motor	44	42 (Baik), 2 (Kurang Baik)
171	Sofa	6	Baik
172	Sound Level Meter	1	Baik
173	Speaker Aktive Komputer	4	Baik
174	Spectrophotometer	1	Baik
175	Speed Boat	3	1 (Baik), 2 (Kurang Baik)
176	Staion Wagon	1	Baik
177	Sumber Radiasi Lain-lain	1	Baik
178	Switch Hub	5	Baik
179	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
180	Tanaman Perkebunan Lain-lain	1	Baik
181	Tandon Air	1	Baik
182	Telephone Mobile	1	Baik
183	Televisi	2	1 (Baik), 1 (Kurang Baik)
184	Teralis	1	Baik
185	Teropong	1	Baik
186	Thermometer	1	Baik
187	Timbangan	4	Baik
188	Turbidi Meter	2	Baik
189	UPS	23	Baik
190	UV/VIS Spectrophotometer	1	Baik
191	Water Sampler	2	Baik
192	Wireless Lan (Internal Card)	1	Baik
193	Wireless Lan (USB)	1	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut capaian kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021:

Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kepulauan Riau

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program						Realisasi Kinerja Program					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup													
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,97	67,70	68,10	68,90	69,20	69,80	66,97	70,19	70,34	66,50	67,00	0
	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	63,64	72,73	72,73	81,82	90,91	100	63,64	80	100	100	40	0
	Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	57,14	57,14	57,14	71,43	85,71	100	57,14	57,14	57,14	71,43	42,85	0
	Persentase pelaku usaha /industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	19	20,60	20,60	20,60	18,50	19,70	19	20,6	22,02	20,3	20	0
	Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai Baku Mutu	%	57,14	57,14	71,43	85,71	100	100	57,14	78,6	100	85,71	100	0
	Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	100	71,43	71,43	85,71	85,71	0	0
2	Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam													
	Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	10	23	26	30	35	40	10	25	51	39	0	0
	Luas Kawasan mangrove yang terehabilitasi	Ha	5	2	3	4	6	7	5	2	5	4	50	0

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program						Realisasi Kinerja Program					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3	Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup													
	Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
4	Program pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan													
	Persentase terbentuknya dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	Angka	0	50	83,3	100	100	100	0	50	100	100	100	0
	Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0
	Luas lahan kritis terehabilitasi	Ha	0	243	220	225	230	230	0	250	335	400	300	0
	Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	0	0	50	66,67	83,33	100	0	-	100	100	83,33	0
	Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	0	75	80	85	90	95	0	75	87,5	85	83,33	0

Berdasarkan hasil dari perhitungan, pada tahun 2019 dan tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau mengalami Penurunan hal tersebut disebabkan karena Penurunan Kualitas Air dengan Masuknya Air Limbah Domestik ke Sumber-sumber Air dan bahan Pencemar Air Lainnya, Penurunan Kondisi Udara dengan meningkatnya sumber-sumber emisi serta berkurangnya hutan sebagai penghasil Oksigen dan penyerap Co2 dan pada Indikator Tutupan Lahan karena Aktifitas Pembukaan Lahan untuk Pembangunan Industri, Alih Fungsi Hutan dan lain-lain. Pada tahun 2020 Indikator Program Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu, Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura, Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional mengalami penurunan dikarenakan Pemerintah lebih mengutamakan Pencegahan Penularan Covid-19 yang mewabah diseluruh dunia maupun Indonesia, serta Surat Edaran KLHK No. S.275/PSLB3/PS/PLB.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 Bahwa Kegiatan Adipura ditiadakan, dan Sekolah-sekolah di Provinsi Kepulauan Riau selama masa Pandemi Covid-19 diliburkan yang menyebabkan tidak adanya Penilaian dan Pemantauan Sekolah-sekolah berbasis Adiwiyata.

Di sektor Kehutanan dalam Indikator Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB selalu mengalami penurunan disebabkan Jumlah Produksi Kayu tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Menurunnya permintaan Kayu andang yang berkaitan dengan kontruksi bangunan, Usaha dibidang Kehutanan (Industri Primer) banyak yang tidak lagi berjalan (Perusahaan tutup). Perhitungan PDRB sektor Kehutanan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, dimana data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau.

Pada table diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 selalu mengalami peningkatan hal tersebut

disebabkan oleh banyak nya Peran serta dari Masyarakat, LSM, Akademisi maupun Dinas-dinas terkait dalam menjaga Lingkungan dan Hutan agar selalu tetap lestari, dan peran serta Polisi Kehutanan yang selalu menjaga dan mengamankan Kawasan Hutan dari Kebakaran Hutan dan Penebangan Hutan secara liar.

Berikut anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata-rata Pertumbuhan anggaran realisasi	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.192.649.087	3.286.738.500	1.286.000.000	2.545.739.000	2.364.245.000	0	2.182.487.755	3.096.897.607	1.166.750.000	2.519.025.380	2.344.597.369	0	99,54	94,22	90,73	98,95	99,17	0		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	95.480.000	0	189.010.000	0	0	0	95.480.000	0	184.665.000	0	0	0	100	0	97,7	0		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	76.880.000	83.212.500	162.641.800	134.000.000	112.754.000	0	72.673.000	82.544.000	162.351.680	133.253.882	112.228.952	0	94,53	99,2	99,82	99,44	99,53	0		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98.500.000	334.122.125	205.000.000	200.000.000	12.582.925	0	96.789.000	329.700.850	203.691.187	197.175.539	12.582.925	0	98,26	98,68	99,36	98,59	100	0		
5	Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemanan dan Pengembalian Sumber Daya Alam	17.117.065.200	2.338.258.770	2.297.116.799	1.749.414.000	1.127.102.918	0	5.100.265.841	2.249.303.043	2.232.379.350	1.126.470.246	1.113.908.384	0	29,8	96,2	97,18	64,39	98,83	0		
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0	735.481.750	1.488.884.000	1.050.000.000	56.973.800	0	0	713.520.000	1.454.091.645	335.119.585	56.398.800	0	0	97,01	97,66	31,92	98,99	0		
7	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	1.325.399.500	784.436.700	1.113.891.000	585.000.000	406.687.562	0	1.253.381.345	781.156.250	1.103.949.566	582.362.900	375.770.012	0	94,57	99,58	99,11	99,55	92,4	0		
8	Program Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan	0	1.260.537.500	2.008.725.000	2.042.595.000	1.602.559.130	0	0	824.791.881	1.803.998.318	1.094.965.568	1.587.276.657	0	0	65,43	89,81	53,61	99,05	0		
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	26.796.119.311	0	0	0	0	0	18.122.387.586	0	0	0	0	0	67,63		
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0	0	242.786.240	0	0	0	0	0	40,46		
11	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	527.488.600	0	0	0	0	0	64.508.200	0	0	0	0	0	12,23		
12	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracuan (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracuan (Limbah B3)	0	0	0	0	0	148.965.500	0	0	0	0	0	40.658.250	0	0	0	0	0	27,29		
13	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLPH)	0	0	0	0	0	21.880.000	0	0	0	0	0	13.943.402	0	0	0	0	0	63,73		
14	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	0	0	0	0	69.848.900	0	0	0	0	0	46.762.661	0	0	0	0	0	66,95		
15	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	34.002.400	0	0	0	0	0	21.686.000	0	0	0	0	0	63,78		
16	Program Pengelolaan Persampahan	0	0	0	0	0	274.602.150	0	0	0	0	0	8.972.000	0	0	0	0	0	3,27		
17	Program Pengelolaan Hutan	0	0	0	0	0	785.670.000	0	0	0	0	0	157.791.230	0	0	0	0	0	20,08		
18	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	0	0	0	0	0	39.424.000	0	0	0	0	0	14.572.000	0	0	0	0	0	36,96		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, karena itu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Berikut tabulasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan urusan bidang lingkungan hidup dan urusan bidang kehutanan:

Tabel 2. 6. Tantangan dan Peluang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tantangan	Peluang
Urusan Lingkungan Hidup	
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan.2. Alih fungsi/peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air.3. Ancaman kerusakan kawasan hutan menyebabkan keanekaragaman hayati4. Kondisi geografis Kepri yang rentan terhadap bencana.5. Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air laut, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.6. Masih lemahnya komitmen para Pemangku kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan.7. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.8. Penurunan indeks kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan	<ol style="list-style-type: none">1. Permen LH Nomor 5 Tahun 2011 melalui pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media pemaksa agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.2. Adanya komitmen pemkab/pemkot di wilayah Prov. Kepri dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayahnya.3. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan.4. Kondisi geografis Kepri yang unik dan banyaknya Perguruan Tinggi dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh Dosen dan Mahasiswa khususnya dalam mitigasi dan antisipasi bencana alam.5. Adanya kegiatan warga masyarakat dalam kreasi daur ulang sampah dan limbah dapat meminimalisir pencemaran lingkungan, contohnya pembuatan ecobrick/bata ramah lingkungan

Tantangan	Peluang
<p>penggunaan kendaraan bermotor.</p> <p>9. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional dan belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah.</p>	
Urusan Kehutanan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan minimal luas kawasan hutan belum terpenuhi sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 sebesar 30% 2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat, pemerintah desa, dan para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), potensi wisata dan jasa lingkungan. 3. Penyelenggaraan rehabilitasi belum direncanakan secara baik dalam satu kesatuan pengelolaan. 4. Tingginya tekanan masyarakat desa/yang tinggal di dekat hutan untuk pemenuhan lahan pertanian, pakan ternak, kayu bakar, dan kayu pertukangan. 5. Perlindungan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan belum dibangun dalam kerangka yuridis legal formal yang kuat, kejelasan hak dan kewajiban, dan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. 6. Pengelolaan hutan rakyat masih dilakukan secara konvensional seperti 7. Belum adanya pendampingan dari pihak terkait bagi pelaku pengolahan kayu hasil hutan. 8. Belum diterapkannya prinsip – prinsip pengelolaan hutan lestari seperti penyusunan rencana pengelolaan hutan, tata hutan hingga tingkat petak, rehabilitasi dan intensifikasi tegakan hutan, perlindungan hutan, konservasi plasma nutfah serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pembangunan hutan hak di lahan-lahan milik atau lahan tanah negara untuk meningkatkan luasan hutan sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 sebesar 30%. 2. Pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan seiring lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL), serta dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT-RHL) 4. Pengembangan/pemanfaatan jasa lingkungan-ekowisata di kawasan hutan negara dan hutan rakyat sebagai alternatif mata pencarian bagi masyarakat desa hutan. 5. Dukungan kebijakan pemerintah pada kegiatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan/atau pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui skema kerjasama/ kemitraan dan perhutanan sosial. 6. Pengembangan komoditi unggulan setempat berbasis karakteristik lokal seperti salak, nangka, dan hutan serbaguna dan pengembangan ASDG (Areal Sumber Daya Genetik) melalui penyediaan bibit berkualitas. 7. Adanya inisiasi untuk pengolahan kayu hasil hutan rakyat menjadi produk setengah jadi (sawmill) atau produk jadi (furniture) seperti yang ada di Lingga. 8. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah melalui kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Tantangan dan peluang yang telah ditabulasi tersebut memerlukan tindak lanjut agar pembangunan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal. Dari lingkup internal, perlu penambahan sumberdaya manusia di internal Dinas maupun di UPTD dibawah Dinas untuk menggantikan petugas lapangan yang purna bhakti.

Berkenaan dengan kompetensi petugas lapangan, perlu dilakukan *capacity building* bagi petugas khususnya dalam hal penguasaan ilmu tata kelola lingkungan, dan tata kelola sosial menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan saat ini. Penanganan lahan kritis dan pengkayaan tanaman merupakan prioritas yang harus dilaksanakan agar potensi sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain menjadi ancaman, masyarakat yang berada disekitar hutan bisa juga menjadi peluang yang besar dalam pembangunan kehutanan. Dengan pelibatan dan penyertaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat ikut mempunyai “rasa” memiliki hutan sebagai milik bersama. Dengan adanya “rasa” ikut memiliki, masyarakat akan ikut menjaga dan melestarikan hutan demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Selain pengoptimalan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang sudah ada perlu adanya upaya pemanfaatan peluang yang dapat dikembangkan lebih lanjut seperti pemanfaatan hutan untuk hasil non kayu dan jasa lingkungan agar hutan mampu memberikan nilai lebih dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mencatat ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penurunan Kualitas Lingkungan (air, udara dan lahan)	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum. b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	2. Belum optimalnya penanganan pencemaran air yang disebabkan oleh perusahaan, minyak kapal, ataupun pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Pemahaman terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku perlu ditingkatkan. b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
	3. Kualitas lingkungan hidup semakin berkurang dengan berkurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pengawasan dan regulasi daerah sebagai implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW..
	4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA. b. Pengelolaan TPA yang belum optimal
Rendahnya Nilai Produksi Kehutanan	1. Belum optimalnya perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK (Hasil Hutan Kayu), HHBK (Hasil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	serta pembinaan usaha kehutanan	Hutan Bukan Kayu), potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal. c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibirkan lahan dan/atau okupasi lahan.
	2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kepri belum optimal.	a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal. b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia. c. Kondisi tegakan hutan di Kepri sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal
	3. Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi	a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan. b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal.
	4. Rendahnya optimalisasi dan koordinasi tentang peran hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan	a. Terdapat ketidakselarasan iklim investasi dengan lokasi investasi. b. Ketidakselarasan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana prasana pemerintahan pada areal yang masih berstatus kawasan hutan
	5. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik. b. Kondisi hutan yang masih rentan terhadap gangguan. c. Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
2. **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya**, maka berdasarkan visi tersebut kemudian dirumuskan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan

memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi focus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu,

tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempererat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Misi ini menggambarkan upaya yang akan ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat

terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Saat ini Kepulauan Riau masih memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok yang tergolong masih tinggi. Pembangunan yang ada di Kepulauan Riau terus diupayakan untuk berkelanjutan dan memiliki pendekatan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat baik secara lahir maupun batin.

Kesejahteraan ekonomi merupakan kesejahteraan fisik yang harus dapat dinikmati oleh pelaku utama yaitu manusianya. Dengan demikian maka kesejahteraan fisik itu harus diikuti oleh kesejahteraan yang lebih riil yang diterima oleh manusia yang terlibat dalam pembangunan. Masyarakat Kepulauan Riau masih memiliki persoalan kesejahteraan dari aspek kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan tingginya angka ketergantungan sebaran pendapatan oleh angkatan kerja, mengingat angka ketergantungan yang cukup tinggi.

3.2.2. Misi

Dari kelima Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, misi 1 yaitu Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat relevan dengan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut identifikasi masalah antara tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan visi, misi, sasaran dan program pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3. 2. Identifikasi Masalah Terhadap Visi dan Misi

No	Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Visi; Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya			
2	Misi ke 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
3	Tujuan : Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah dan Keberlanjutan Lingkungan			
4	Sasaran :			
	a. Mewujudkan Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. b. Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari			
	Program;			
	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perencanaan dalam bidang lingkungan hidup	Tersedianya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Belum tersedianya data base kondisi lingkungan hidup
	b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Tersedianya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
	c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	Tersedianya kebun bibit	Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas
5	d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Ketersediaan lahan yang cukup serta kelembagaan dalam penanganan Limbah B3	Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium
	e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Rendahnya kapasitas organisasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Ketersediaan Laboratorium lingkungan	Minimnya dukungan sarana dan prasarana
	f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Rendahnya tingkat ketiaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Kesediaan masyarakat/Sekolah/Pemerintah Desa menjadi mitra.	Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup

No	Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	untuk Masyarakat.	hidup.		
	g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.	Belum dilakukan secara regular/berkala	Tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup	Keseriusan pemerintah/DLHK masih kurang
	h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	Rendahnya tingkat ketataan pemprakarsa kegiatan dalam pengelolaan aduan.	Ketersediaan SOP dalam penyampaian aduan	Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	i. Program Pengelolaan Persampahan.	Belum optimalnya pengelolaan persampahan sekala regional	Ketersediaan lokasi pegelolaan sampah serta munculnya kesadaran kolektif/komunal.	Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.
	j. Program Pengelolaan Hutan	Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha bidang kehutanan	Kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan serta adanya Forum BP DAS	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan kehutanan
	k. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.	Belum Optimalnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.	Kesediaan masyarakat sekitar hutan untuk dijadikan mitra	Inisiatif untuk melibatkan masyarakat masih relatif rendah terkait strategisnya kawasan hutan
	l. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	Minimnya tingkat hunian di bantaran sungai	Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahun. Permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi dari beberapa lembaga baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tentunya akan didukung dengan kebijakan perencanaan pada tingkat local. Untuk itu maka perlu disusun perencanaan yang komprehensif dan multi sektor/lembaga.

Berikut akan disajikan telaah berdasarkan arah kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3. 3. Identifikasi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
-1	2	-3	-4	-5
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim			
	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Adanya tim penanganan limbah sludge oil	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	Munculnya kesadaran masyarakat untuk membuat bank sampah	Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.
	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi,	Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	Terbangunnya komunikasi dengan Balai DAS yang cukup intens dan terbentuknya ForDAS	Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik.

No	Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah	Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap isu lingkungan hidup.	Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum.
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan			
	Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi	Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	Penyederhanaan regulasi melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia.
	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang diupayakan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi	Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan hutan untuk meningkatkan nilai ekonomi maupun nilai lingkungan.	Penyederhanaan regulasi melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Tidak selarasnya iklim investasi dengan lokasi investasi
3	Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan			
	Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030	Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	Adanya kepastian atas kepemilikan lahan melalui sertifikasi tanah	Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya perluasan lahan dan/atau okupasi lahan.
	Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	Ketersediaan regulasi (Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK (Hasil Hutan Kayu), HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

No	Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara	Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi	Perhutanan Sosial (POKJA PPS)	
			Ketersediaan regulasi (Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)	Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 yang mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Provinsi Kepulauan Riau

yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Kepulauan Riau.

3.4.1.1. Struktur Ruang.

Struktur ruang wilayah provinsi:

- a. Pusat-pusat kegiatan, yang terdiri dari; Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di Kota Batam, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di kota tanjungpinang, kabupaten Lingga, kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Karimun, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- b. Sistem jaringan prasarana utama.
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
 1. Sistem jaringan energy.
 2. Sistem jaringan telekomunikasi.
 3. Sistem jaringan sumberdaya air.
 4. Sistem jaringan lainnya.

3.4.1.2. Pola Ruang

Pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan mengacu pada tata ruang nasional, serta memperhatikan pola ruang yang berada di kabupaten/kota. Pola ruang wilayah Provinsi meliputi:

- a. Kawasan lindung.
- b. Kawasan budidaya.
- c. Pemanfaatan ruang laut.

Kawasan yang ditentukan sebagai Hutan Lindung (HL) di provinsi Kepulauan Riau meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Bintan meliputi HL Sungai Pulau, HL Gunung Lengkuas, HL Gunung Kijang, HL Gunung Bintan Besar, HL Gunung Bintan Kecil, HL Sungai

Jago, HL Sebong Lobam, HL Pulau Tambelan I dan HL Pulau Tambelan II.

- b. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Karimun meliputi HL Gunung Jantan Betina, HL Pulau Durian, HL Pulau Panjang, HL Pulau Combol, HL Karimun Kecil, HL Tanjung Selayang-Tanjung Buluh Kasap, HL Pulau Tokong Hiu Besar, dan HL Pulau Moro Tengah.
- c. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Lingga meliputi HL Gunung Daik, HL Gunung Muncung, HL Gunung Lanjut, HL Bukit Raja, HL Sungai Nerekeh-Sungai Semarung dan HL Pulau Sebangka.
- d. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi HL Jemaja Utara, HL Jemaja Selatan, HL Matak I dan HL Matak II.
- e. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Natuna meliputi HL Gunung Ranai, HL Gunung Sekunyam dan HL Gunung Bedung.
- f. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kota Tanjungpinang meliputi HL Bukit Kucing dan HL Sungai Pulai.
- g. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kota Batam meliputi HL Nongsa I, HL Nongsa II, HL Batu Ampar, HL Dangas, HL Tanjung Uncang I, HL Sei Harapan, HL Tiban, HL Sei Pelunut, HL Sei Peparan, HL Sei Tembesi, HL Sei Beduk I, HL Sei Beduk II, HL Setokok, HL Tanjung Sinembah, HL Tanjung Kota, HL Tanjung Dongdang, HL.
- h. Rundan I, HL Rundan III, HL Randang Daja-Bukit Kenan, HL Rempang Cate, HL Blokeng-Kepala Tujuh, HL Monggak, HL Bukit Bedagang, HL Pasir Panjang, HL Senhasen, HL Tanjung Temiang, HL Sei Carus, HL Pulau Galang I, HL Pulau Galang II, HL Pulau Galang III, HL Tanjung Malang, HL Sei Hulu Galang, HL Bukit Kandap, HL Tanjung Ujin, HL Sei Cogok Tapan, HL Sei Pelepas, HL Tanjung Kokot I, HL Tanjung Kokot II, HL Galang

Baru I, HL Galang Baru II, HL Galang Baru V, HL Tanjung Kasam, HL Duriangkang dan HL Sei Ulu Lajai.

Tabel 3. 4. Identifikasi Masalah Rencana Tata Ruang

No	Kebijakan RTRW	Permasalahan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
1 Struktur Ruang				
	Sistem Pembuangan Air Limbah	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
	Sistem Pengelolaan Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	Ketersediaan buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dari PUPR	Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terpadu	Rendahnya kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.	Terbukanya peluang kerjasama dalam pengujian limbah B3	Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium
2 Pola Ruang				
	Kebijakan ruang kawasan hutan lindung (HL)	Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung belum optimal.	Ketersediaan regulasi (Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)	Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen KLHS RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memiliki tujuan utama untuk memastikan agar kebijakan, rencana, dan program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tersebut dilaksanakan. Hasil dari penyusunan KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rekomendasi KLHS ada beberapa isu atau indicator capaian yang diprioritaskan dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melihat perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
2. Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca.
3. Rasio Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.
4. Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihian kawasan DAS.
5. Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.
6. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
7. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
8. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
9. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

Selanjutnya isu atau indikator capaian tersebut diatas berkaitan dengan empat program, yaitu;

1. Program Pengelolaan Hutan
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
4. Program Pengelolaan Persampahan

Tabel 3. 5. Telaah Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator capaian	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS RPJMD
Air bersih dan sanitasi layak	61,9 %	berkurangnya lahan untuk air menyerap ke dalam tanah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kota & Pemukiman yang berkelanjutan	33.33 %	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis limbah juga semakin kompleks seperti plastic, logam atau jenis lain. •Daya dukung untuk pembangunan perlu menjadi perhatian karena keterbatasan lahan 	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab	40 %	Menjaga daya dukung pangan sehingga tidak terlalu bergantung pada daerah lain	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Penanganan dan perubahan iklim	100 %	Kelestarian hutan perlu menjadi perhatian utama	Program Pengelolaan Hutan
Ekosistem lautan	50 %		
Ekosistem daratan	14.29 %	Pelestarian keanekaragaman hayati.	<ul style="list-style-type: none"> •Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup •Program Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan

Tabel 3. 6. Identifikasi Terhadap KLHS

No	Rekomendasi KLHS Terhadap Program RPJMD			Permasalahan OPD	Faktor	
	-1	-2	-3		Pendorong	Penghambat
-1	-2			-3	-4	-5
1	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Program Pencemaran Kerusakan Lingkungan	Pengendalian Dan/Atau Lingkungan	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Tersedianya regulasi	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
2	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Program Pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian dan/atau lingkungan	Rendahnya kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.	Terbukanya peluang kerjasama dengan laboratorium Uji BP Batam	Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium
3	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Program Pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian dan/atau lingkungan	Rendahnya kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.	Terbukanya peluang kerjasama dengan laboratorium Uji BP Batam	Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium
4	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Program Pengelolaan Hutan		Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik	Terbangunnya komunikasi dengan Balai DAS yang cukup intens dan terbentuknya ForDAS	Kondisi hutan yang masih rentan terhadap gangguan
5	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Program Pengelolaan Hutan		Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	Meningkatnya kemitraan dalam program penanaman pohon	Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam

No	Rekomendasi KLHS Terhadap Program RPJMD	Permasalahan OPD	Faktor		
			Pendorong	Penghambat	
-1	-2	-3	-4	-5	
7	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Belum optimalnya penerapan dan pengembangan green waste di kawasan perkotaan.	Ketersediaan bank sampah	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penangannya.
8	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Program Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	Peluang kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah	Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.
9	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Program Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Terbukanya peluang kerjasama dengan laboratorium Uji BP Batam	Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah.
10	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Program Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	Peluang kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah	Belum terjalinnya kerjasama dalam pengelolaan sampah regional.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Permasalahan atau isu strategis pada urusan lingkungan hidup dan Kehutanan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air
2. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah
3. Potensi bencana alam dan perubahan iklim
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
5. Relativ rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:



4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuannya yaitu;

- a) Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari.
- c) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada awal Renstra nilai indeks 69,47 dan pada akhir renstra 70,38. Untuk PDRB Sektor Kehutanan pada awal Renstra 27 Milyar dan pada akhir Renstra 27,50 Milyar. Sedangkan Rehabilitasi Lahan

Kritis pada awal Renstra 255 hektar dan pada akhir Renstra 290 Hektar.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a) Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari.
- c) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada awal Renstra nilai indeks 69,47 dan pada akhir renstra 70,38. Untuk PDRB Sektor Kehutanan pada awal Renstra 27 Milyar dan pada akhir Renstra 27,50 Milyar. Sedangkan Rehabilitasi Lahan Kritis pada awal Renstra 255 hektar dan pada akhir Renstra 290 Hektar.

Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69.47	69.73	69.95	70.18	70.28		70.38
	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	20	20	20	20	20		20
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	0,52	0,74	0,77	0,80	0,83		0,89
			Indeks Kualitas Air	Indeks	56.60	56.70	56.80	56.90	70.00		70.10
			Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88.14	88.25	88.35	88.46	88.56		88.67
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59.07	59.08	59.09	59.10	59.11		59.12
			Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0	14.28	14.28	28.57	42.58		57.17
			Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	26.27	33.33	33.33	40.00	40.00		46.67
			Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	100	100	100	100		100
			Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	28.57	42.85	57.14	71.43	85.71		85.71

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	57.14	57.14	71.43	71.43	85.71	85.71	
			Persentase Pengurangan Sampah	%	24	26	27	28	30	30	
			Persentase Penanganan Sampah	%	74	73	72	71	70	70	
2.	Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Milliar (Rp)	27.00	27.10	27.20	27.30	27.40	27.50	
	Meningkatnya pemanfaatan Hutan Lestari		Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Milliar (Rp)	27.00	27.10	27.20	27.30	27.40	27.50	
			Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	5	5	10	10	10	10	
			Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500	500	500	500	500	500	
			Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	2	2	2	2	2	
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Nilai SAKIP	skor	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan	Nilai SAKIP	skor	B	B	B	B	B	B	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Hidup dan Kehutanan									

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara /

langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi ; Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya Misi ; Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Mendorong pemanfaatan ruang yang peka terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku	Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut Pelaksanaan: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim Pengelolaan limbah sluge Oil di Kawasan Pesisir Pengelolaan ruang terbuka hijau Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah b3 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Penilaian dan Pemantauan, Pendampingan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau
Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari	Meningkatnya Pemanfaatan Lestari	Hutan	Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat dan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasi Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Kehutanan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pengembangan Perhutanan Sosial Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS

Commented [L1]: Bahasa diseragamkan dengan kata "pe-an, misalnya peningkatan, perlu diselaraskan dengan program dan kegiatan

Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya

Misi: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Commented [L1]: Bahasa diseragamkan dengan kata "pe-an, misalnya peningkatan, perlu diselaraskan dengan program dan kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditetapkan program nasional dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Pengendalian

- Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kegiatan dalam Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagai berikut;
 - ✓ Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Kegiatan dalam Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) sebagai berikut;
 - ✓ Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kegiatan dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut;
 - ✓ Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
Kegiatan dalam Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagai berikut;
 - ✓ Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
Kegiatan dalam Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - ✓ Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
10. Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan dalam Pengelolaan Persampahan sebagai berikut;
 - ✓ Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
11. Program Pengelolaan Hutan. Kegiatan dalam Program Pengelolaan Hutan sebagai berikut;
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
 - c. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - d. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
12. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan. Kegiatan dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan sebagai berikut;

- ✓ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kegiatan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) sebagai berikut;

- ✓ Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Tabel 6. 1. Program Kerja, Kegiatan / Output, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi									
						2021 (TAHUN BERJALAN)						2022						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Reinsira Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBUTUHAN					32.958.227.790		32.675.220.700		35.151.407.646		37.747.242.662		40.002.863.187		42.895.116.807		221.430.078.792								
Meningkatkan Kualitas Tata Kehidupan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perseentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100%	25.212.459.790	100%	31.364.021.684	100%	33.623.977.085	100%	36.046.819.072	100%	38.644.291.046	100%	41.428.983.302	100%	207.320.551.979		Kepulauan Riau									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD	1 Dokumen	811.484.050	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	3.161.484.050		Kepulauan Riau															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Rencana Kerja OPD	1 Dokumen	235.803.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	610.803.000		Kepulauan Riau									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kordinasi dan Sirkonisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	264.253.400	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	6 Laporan	1.314.253.400		Kepulauan Riau									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terleksananya Pencapaian Monev Pembinaan Kab/Kota	1 Laporan	311.427.650	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	125.000.000	6 Laporan	1.236.427.650		Kepulauan Riau													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN	1 Tahun	20.664.947.825	1 Tahun	26.915.627.009	1 Tahun	27.915.627.009	1 Tahun	29.916.826.024	1 Tahun	31.464.297.998	1 Tahun	34.265.588.627	1 Tahun	171.142.914.492		Kepulauan Riau									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	19.472.987.825	1 Tahun	25.723.667.009	1 Tahun	26.723.667.009	1 Tahun	28.724.866.024	1 Tahun	30.272.337.998	1 Tahun	33.073.628.627	1 Tahun	163.991.154.492		Kepulauan Riau									
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1.191.960.000	1 Tahun	1.191.960.000	1 Tahun	1.191.960.000	1 Tahun	1.191.960.000	1 Tahun	1.191.960.000	1 Tahun	1.191.960.000	1 Tahun	7.151.760.000		Kepulauan Riau									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengadimanistrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	192.480.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	195.000.000	1 Tahun	587.480.000		Kepulauan Riau							
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kondisi Barang	1 Laporan	192.480.000	1 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	192.480.000	Tanjungpinang								
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan terhadap Barang Milik OPD	1 Laporan	0	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	195.000.000	1 Tahun	385.000.000		Kepulauan Riau							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai	0 Orang	0	5 Orang	300.000.000	15 Orang	280.000.000	15 Orang	250.000.000	15 Orang	350.000.000	15 Orang	250.000.000	15 Orang	250.000.000	55 Orang	1.430.000.000		Kepulauan Riau							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang	250.000.000	15 Orang	150.000.000	15 Orang	250.000.000	15 Orang	150.000.000	15 Orang	150.000.000	55 Orang	800.000.000		Tanjungpinang							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (LPTD Laboratorium Lingkungan)	Jumlah Pelatihan/ In House Training SDM/Laboratorium Lingkungan	0 kali	0	2 kali	300.000.000	2 kali	30.000.000	2 kali	100.000.000	2 kali	630.000.000		Tanjungpinang													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu	Lokasi
						2021 (TAHUN BERJALAN)		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor	1 Tahun	2.158.324.925	1 Tahun	1.186.896.275	1 Tahun	1.256.896.275	1 Tahun	1.486.896.275	1 Tahun	1.736.896.275	1 Tahun	1.766.896.275	1 Tahun	9.592.806.300	Kepulauan Riau
			Penyediaan Komponen Instansi	Jumlah Penyediaan Peralatan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	4.317.500	1 Paket	25.000.000	1 Paket	129.317.500	Tanjungpinang								
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	63.428.200	1 Paket	63.428.200	1 Paket	63.428.200	1 Paket	63.428.200	1 Paket	63.428.200	1 Paket	63.428.200	1 Paket	380.569.200	Tanjungpinang
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan	1 Paket	26.253.400	1 Paket	26.253.400	1 Paket	26.253.400	1 Paket	26.253.400	1 Paket	26.253.400	1 Paket	26.253.400	1 Paket	157.520.400	Tanjungpinang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat-alat Peldung Diri Covid 19	1 Paket	474.546.325	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	1.324.546.325	Tanjungpinang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor	1 Paket	84.356.500	1 Paket	50.000.000	1 Paket	334.356.500	Tanjungpinang								
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Pemenuhan Bahan Bacaan Kantor	1 Paket	44.928.000	1 Paket	44.928.000	1 Paket	44.928.000	1 Paket	144.928.000	1 Paket	144.928.000	1 Paket	94.928.000	1 Paket	519.568.000	Tanjungpinang
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan Material	1 Paket	24.746.500	1 Paket	0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	374.746.500	
			fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	24.584.000	1 Paket	24.584.000	1 Paket	24.584.000	1 Paket	24.584.000	1 Paket	24.584.000	1 Paket	54.584.000	1 Paket	177.504.000	Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terperihinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	1.260.806.500	1 Paket	802.702.675	1 Paket	752.702.675	1 Paket	802.702.675	1 Paket	902.702.675	1 Paket	952.702.675	1 Paket	5.474.319.875	Kepulauan Riau
			Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	Tertatinya Penata Usaha Arsip	1 Tahun	150.358.000	1 Tahun	0	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	720.358.000	Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	253.845.000	1 Tahun	144.497.000	1 Tahun	804.452.401	1 Tahun	876.095.373	1 Tahun	1.076.095.373	1 Tahun	1.144.497.000	1 Tahun	4.299.482.147	Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	500.000.000	1 Paket	575.000.000	1 Paket	575.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket	2.250.000.000	Kepulauan Riau
			Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Paket	34.497.000	1 Paket	34.497.000	1 Paket	104.497.000	1 Paket	191.095.373	1 Paket	191.095.373	1 Paket	184.497.000	1 Paket	740.178.746	Kepulauan Riau
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	99.799.100	1 Paket	50.000.000	1 Paket	139.955.401	1 Paket	50.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	689.754.501	Kepulauan Riau
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	119.548.900	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	619.548.900	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperihinya kebutuhan Pelayanan Kantor	1 Tahun	1.505.443.490	1 Tahun	1.931.051.800	1 Tahun	1.931.051.800	1 Tahun	2.281.051.800	1 Tahun	2.431.051.800	1 Tahun	2.431.051.800	1 Tahun	12.510.702.490	Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Jasa Pengiriman Surat	1 Tahun	7.160.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	182.160.000	Kepulauan Riau								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Air Bersih dan TV Kabel	1 Paket	181.935.690	1 Paket	65.000.000	1 Paket	506.935.690	Kepulauan Riau								
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	44.551.800	1 Tahun	44.551.800	1 Tahun	44.551.800	1 Tahun	94.551.800	1 Tahun	144.551.800	1 Tahun	44.551.800	1 Tahun	417.310.800	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1.271.796.000	1 Tahun	1.786.500.000	1 tahun	1.786.500.000	1 tahun	2.085.500.000	1 tahun	2.186.500.000	1 tahun	2.286.500.000	1 tahun	11.404.296.000	Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	625.934.500	1 Tahun	485.949.600	1 Tahun	885.949.600	1 Tahun	685.949.600	1 Tahun	1.035.949.600	1 Tahun	875.949.600	1 Tahun	4.595.682.500	Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan terhadap Kendaraan Dinas	1 Tahun	310.949.600	1 Tahun	310.949.600	1 Tahun	710.949.600	1 Tahun	410.949.600	1 Tahun	710.949.600	1 Tahun	610.949.600	1 Tahun	3.065.697.600	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	300.800.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	190.000.000	1 Tahun	1.190.800.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Tahun	14.184.900	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	125.000.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	339.184.900	Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2021 (TAHUN BERJALAN)		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
Menurunkan Pencemaran dan kerosakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah		100%	1.350.000.000	100%	139.698.474	100%	157.909.046	100%	152.827.147	100%	167.381.370	100%	185.030.639	100%	2.152.846.676	Kepulauan Riau
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH	0 Dokumen	0	1 Dokumen	59.698.474	1 Dokumen	57.909.046	1 Dokumen	72.827.147	1 Dokumen	87.381.370	1 Dokumen	85.030.639	1 Dokumen	362.846.676	Kepulauan Riau	
			Penyusuran dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung LH	0 Laporan	0	1 Laporan	39.698.474	1 Laporan	57.909.046	1 Laporan	52.827.147	1 Laporan	67.381.370	1 Laporan	85.030.639	1 Laporan	302.846.676	Kepulauan Riau	
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian terhadap Pelaksanaan RPPLH Provinsi	0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	80.000.000	Kepulauan Riau	
			Penyelegaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1 Dokumen	1.350.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1.790.000.000		
			Perbautan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Laporan KLHS untuk Rencana Tata Ruang	1 Laporan	675.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	785.000.000		
			Perbautan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan KLHS untuk RPJPD/RPJMD	1 Laporan	675.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	695.000.000		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Laporan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0 Laporan	0	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	210.000.000	Kepulauan Riau	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko LH	Jumlah Laporan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko LH	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	100.000.000	Kepulauan Riau	
			Indeks Kualitas Air Laut	76,1	76,75	77,39	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04			
			Indeks Kualitas Air	56,60	56,70	56,80	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	Kepulauan Riau	
			Indeks Kualitas Udara Ambien	88,14	1.957.020.000	88,25	88,35	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,07	59,08	59,09	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	Kepulauan Riau	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan	331.200.000	1 Laporan	68.397.112	1 Laporan	76.096.046	1 Laporan	91.394.318	1 Laporan	94.859.756	1 Laporan	131.188.703	1 Laporan	793.135.935	Kepulauan Riau	
			Koordinasi, Sirkuitensi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan hasil Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut Diketahui terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Laporan	331.200.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	37.699.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	498.899.000	Kepulauan Riau	
			Koordinasi, Sirkuitensi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Penambahan Kampung Jidin	0 Laporan	0	1 Laporan	28.397.112	1 Laporan	18.397.046	1 Laporan	31.394.318	1 Laporan	39.859.756	1 Laporan	46.188.703	1 Laporan	164.236.935	Kepulauan Riau	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UP2D Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi)	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	0 Laporan	20.000.000	0 Laporan	30.000.000	0 Laporan	25.000.000	0 Laporan	35.000.000	0 Laporan	130.000.000	Batam	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendaliya Penanganan Akibat Limbah Sludge Oil di Wilayah Pesisir	1 Paket	293.304.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	478.304.000	Batam dan Bintan	
			Pemberian Informasi Pengertian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH pada Masyarakat	Jumlah Laporan Penyusunan: (1) DLH dan (2) IXPLHD	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	80.000.000	Kepulauan Riau	
			Pengisianan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang terkelebi Limbah Sludge Oilya	3 Kab/Kota	293.304.000	3 Kab/Kota	20.000.000	3 Kab/Kota	20.000.000	3 Kab/Kota	20.000.000	3 Kab/Kota	20.000.000	3 Kab/Kota	20.000.000	3 Kab/Kota	393.304.000	Batam, Bintan dan Karimun	
			Penghitungan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Perilaku Penghitungan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	1 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu	Lokasi		
						2021 (TAHUN BERJALAN)			2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1.332.516.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen	1.447.516.000				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Laporan Penghentian Sumber Pencemaran	1 Laporan	1.332.516.000	1 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0 Laporan	1.347.516.000				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Ursur Pencemar	Jumlah Laporan Pembersihan Ursur Pencemar	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0 Laporan	35.000.000				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Remediasi	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	5.000.000			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	50.000.000			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Restorasi	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	10.000.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	0	0	14,28%	51.859.454	14,28%	73.280.296	28,57%	89.170.386	42,58%	91.327.899	57,14%	118.506.804	57,14%	424.144.839	Kepulauan Riau		
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	0 Dokumen	0	1 Dokumen	51.859.454	1 Dokumen	73.280.296	1 Dokumen	89.170.386	1 Dokumen	91.327.899	1 Dokumen	118.506.804	1 Dokumen	424.144.839	Kepulauan Riau		
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Dokumen	0	1 Dokumen	51.859.454	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	81.859.454	Kepulauan Riau		
			Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kebun Raya yang dikelola	0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota	10.000.000	1 Kab/Kota	10.000.000	1 Kab/Kota	10.000.000	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	30.000.000			
			Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Kebun Raya yang dikelola	0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota	10.000.000	1 Kab/Kota	10.000.000	1 Kab/Kota	10.000.000	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	30.000.000			
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	1 Lokasi	23.280.296	1 Lokasi	39.170.386	1 Lokasi	41.327.899	1 Lokasi	50.000.000	1 Lokasi	153.778.581	Kepulauan Riau		
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati yang terlebarkan	Lokasi	0	Lokasi	0	1 Lokasi	5.000.000	1 Lokasi	5.000.000	1 Lokasi	5.000.000	1 Lokasi	0	3 Lokasi	15.000.000			
			Pengembangan Kapasitas Kebenongan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kelompok	0	Kelompok	0	1 Kelompok	10.000.000	1 Kelompok	10.000.000	1 Kelompok	10.000.000	1 Kelompok	0	4 Kelompok	30.000.000			
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang terlebarkan	Paket	0	Paket	0	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	68.506.804	4 Paket	83.506.804	Kepulauan Riau		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi		26,67%	184.520.900	33,33%	43.846.587	33,33%	43.166.695	40,00%	41.777.485	40,00%	45.756.090	46,67%	50.580.770	46,67%	409.648.527	Kepulauan Riau	
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Terlindanya Pengelolaan Limbah B3 terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki	50 Perusahaan	184.520.900	20 Perusahaan	43.846.587	5 Perusahaan	43.166.695	5 Perusahaan	41.777.485	5 Perusahaan	45.756.090	5 Perusahaan	50.580.770	5 Perusahaan	409.648.527	Kepulauan Riau		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Pelaku Usaha/ Perusahaan yang di monitoring dan dawasi dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3	50 Perusahaan	184.520.900	5 Perusahaan	23.846.587	5 Perusahaan	23.166.695	5 Perusahaan	21.777.485	5 Perusahaan	25.756.090	5 Perusahaan	30.580.770	5 Perusahaan	309.648.527	Kepulauan Riau		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Peralatan Penanganan Limbah B3	1 Paket	0	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	100.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						2021 (TAHUN BERJALAN)			2022			2023			2024			2025			Kondisi Kinerja Pada Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi		100%	61.957.000	100%	14.722.468	100%	14.494.179	100%	14.027.721	100%	15.363.626	100%	16.983.620	100%	137.548.614		Kepulauan Riau
			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diberi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	35 Perusahaan	61.957.000	5 Perusahaan	14.722.468	5 Perusahaan	14.494.179	5 Perusahaan	14.027.721	5 Perusahaan	15.363.626	5 Perusahaan	16.983.620	5 Perusahaan	137.548.614		Kepulauan Riau	
			Fasilitasi Pemenuhan Keteruatan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Taat Peraturan yang berlaku	35 Perusahaan	61.957.000	1 Perusahaan	14.722.468	1 Perusahaan	5.494.179	1 Perusahaan	5.027.721	1 Perusahaan	5.363.626	1 Perusahaan	6.983.620	1 Perusahaan	99.548.614		Kepulauan Riau	
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	Orang	0	1 Orang	2.000.000	4 Orang	8.000.000		Kepulauan Riau							
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang diberi Izin yang sudah diterbitkan	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0	1 Perusahaan	5.000.000	1 Perusahaan	20.000.000		Kepulauan Riau								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kali	0	Kali	0	1 Kali	2.000.000	1 Kali	2.000.000	1 Kali	3.000.000	1 Kali	3.000.000	4 Kali	10.000.000		Kepulauan Riau	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih penghargaan	28,57%	0	42,85%	123.166.202	57,14%	207.627.507	71,43%	250.791.711	85,71%	159.823.824	85,71%	165.909.526	85,71%	907.318.770		Kepulauan Riau	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Adipura	0 Kab/Kota	5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota				Kepulauan Riau	
				Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tingkat Provinsi dan atau tingkat Nasional	0 Sekolah	0	10 Sekolah	123.166.202	10 Sekolah	207.627.507	10 Sekolah	250.791.711	10 Sekolah	159.823.824	10 Sekolah	165.909.526	10 Sekolah	907.318.770		Kepulauan Riau	
				Jumlah orang yang mendapat penghargaan Kalpataru	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket				Kepulauan Riau	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	0 kelompok	0	kelompok	0	2 kelompok	50.000.000	1 kelompok	20.000.000	0 kelompok	0	1 kelompok	30.000.000	4 kelompok	100.000.000		Kepulauan Riau	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian dan Perantauan, Pendampingan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Paket	0	1 paket	63.166.202	1 paket	97.627.507	1 paket	130.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	85.909.526	5 paket	476.703.235		Kepulauan Riau	
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Peringatan Hari Lingkungan Hidup/ Hari Peduli Sampah Nasional/Hari Bakti Rintawen/Hari Meriah	0 Paket	0	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	100.791.711	1 Paket	598.23824	1 Paket	50.000.000	5 Paket	330.615.535		Kepulauan Riau	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100%	310.441.400	100%	35.535.153	100%	40.167.383	100%	38.874.698	100%	42.576.861	100%	47.066.312	100%	514.661.807		Kepulauan Riau	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	100%	310.441.400	100%	35.535.153	100%	40.167.383	100%	38.874.698	100%	42.576.861	100%	47.066.312	100%	514.661.807		Kepulauan Riau	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan LH	30 Perusahaan	310.441.400	10 Perusahaan	35.535.153	10 Perusahaan	40.167.383	10 Perusahaan	38.874.698	10 Perusahaan	42.576.861	10 Perusahaan	47.066.312	10 Perusahaan	514.661.807		Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2021 (TAHUN BERPJALAN)		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		57,14%	151.126.500	57,14%	35.911.277	71,43%	35.354.432	71,43%	34.216.640	85,71%	37.475.201	85,71%	41.426.715	85,71%	335.510.765	Kepulauan Riau
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan		7 Kasus	151.126.500	7 Kasus	35.911.277	7 Kasus	35.354.432	7 Kasus	34.216.640	7 Kasus	37.475.201	7 Kasus	41.426.715	7 Kasus	335.510.765	Kepulauan Riau
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah tindak lanjut pengaduan		7 Kasus	151.126.500	3 Kasus	25.911.277	3 Kasus	25.354.432	3 Kasus	24.216.640	3 Kasus	37.475.201	3 Kasus	41.426.715	22 Kasus	305.510.765	Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan		1 Laporan	151.126.500	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	181.126.500	Kepulauan Riau
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	24%	0	26%	65.252.074	27%	64.240.266	28%	62.172.857	30%	68.093.779	30%	75.273.822	30%	335.032.798	Kepulauan Riau	
				Persentase Penanganan Sampah	74%		73%		72%		71%		70%		70%		70%			Kepulauan Riau
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA		1 Paket	0	1 Paket	65.252.074	1 Paket	64.240.266	1 Paket	62.172.857	1 Paket	68.093.779	1 Paket	75.273.822	1 Paket	335.032.798	Bintan - Tanjungpinang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Pengelolaan TPA Regional		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	Bintan- Tanjungpinang
			Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Pemrosesan Akhir di TPA/TPST		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Pemeliharaan TPA/TPST		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	Bintan- Tanjungpinang
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus		2 kali	274.602.250	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	279.602.250	Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		0 Paket	0	1 Paket	65.252.074	1 Paket	24.240.266	1 Paket	42.172.857	1 Paket	68.093.779	1 Paket	75.273.822	1 Paket	275.032.798	Bintan- Tanjungpinang
			Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		0 Kab/ Kota	0	0 Kab/ Kota	0	1 Kab/ Kota	5.000.000	0 Kab/ Kota	0	0 Kab/ Kota	0	0 Kab/ Kota	0	1 Kab/ Kota	5.000.000	Kepulauan Riau
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Prasarana dan Sarana TPA/TPST Regional di Provinsi Kepulauan Riau		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	10.000.000	1 Paket	20.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	30.000.000	Bintan- Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Panaonu	Lokasi
						2021 (TAHUN BERJALAN)		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir	
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
BIDANG KEHUTANAN																			
Meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Sektoral Permafaatan Hutan Lestari terhadap PDRB Haga Berdik	Kontribusi Pemanfaatan Sektoral kehutanan terhadap PDRB Haga Berdik	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)		27,00	1.942.760.400	27,10	532.379.132	27,20	524.123.987	27,30	507.256.394	27,40	277.782.030	27,50	307.072.326	27,50	4.091.374.269	Kepulauan Riau
Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Rehabilitasi Lahan Kritis		5 Ha		5 Ha		5 Ha		5 Ha		5 Ha		5 Ha		5 Ha		5 Ha		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau		0 Tahun	0	1 Tahun	340.000.000	1 Tahun	201.744.855	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	125.000.000	1 Tahun	247.072.326	1 Tahun	1.163.817.181	Kepulauan Riau		
Penyusunan Rancangan Tata Hutan Wilayah Hutan Wayah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Tata Hutan Wilayah		0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Karimun		
Pembangunan Blok/Petaik Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Laporan Pembagian blok Pengelolaan Hutan KPH		0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	Batam		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasrama Operasionalasi KPH (UPTD KHPH Unit I Karimun)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		0 Bulan	0	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	155.000.000	Karimun		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasrama Operasionalasi KPH (UPTD KHPH Unit II Batam)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		0 Bulan	0	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	135.000.000	Batam		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasrama Operasionalasi KPH (UPTD KHPH Unit III Lingga)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		0 Bulan	0	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	155.000.000	Lingga		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasrama Operasionalasi KPH (UPTD KHPH Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		0 Bulan	0	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	165.000.000	Bintan-Tanjungpinang		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasrama Operasionalasi KPH (UPTD KHPH Unit V Natura)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		0 Bulan	0	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	190.000.000	Natura		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasrama Operasionalasi KPH (UPTD KHPH Unit VI Keruluan Anambas)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		0 Bulan	0	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	36.744.855	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	261.744.855	Anambas		
Koordinasi dan Sincronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Perumukiman Hutan	Jumlah Dokumen Peta serta Usulan Perubahan Perumukiman dan Fungsi Hutan		0 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	12.072.326	1 Dokumen	92.072.326	Kepulauan Riau		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	Kepulauan Riau		
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHPH Unit I Karimun)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Kepulauan Riau		
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHPH Unit II Batam)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Kepulauan Riau		
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHPH Unit III Lingga)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Kepulauan Riau		
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHPH Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Kepulauan Riau		
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHPH Unit V Natura)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Kepulauan Riau		
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHPH Unit VI Anambas)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Kepulauan Riau		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Berjalan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penangguhjawab	Lokasi									
						2021 (TAHUN BERJALAN)				2022				2023				2024				2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terkelolaanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	1 Paket	350.441.700	1 Paket	60.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	32.782.030	1 Paket	30.000.000	1 Paket	633.223.730		Kepulauan Riau								
			Penyebarluasan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1 Laporan	129.659.100	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	144.659.100		Kepulauan Riau								
			Penyebarluasan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	17.782.030	1 Laporan	15.000.000	5 Laporan	92.782.030		Kepulauan Riau								
			Pelaporan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada BPK Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Laporan Kerjasama Melalui Sistem Elektronik	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	5.000.000		Kepulauan Riau								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1 Kali	220.782.600	1 Kali	20.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	15.000.000	6 Kali	305.782.600		Kepulauan Riau								
				2. Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi peraturan terkait penatausahaan hasil hutan pada Hutan Produksi	20 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha			Kepulauan Riau								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Lindung	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000	0 Kali	0	3 Kali	15.000.000		Kepulauan Riau								
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi sesuai Ketentuan yang berlaku	0 Dokumen	0	0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	20.000.000		Kepulauan Riau								
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung sesuai Ketentuan yang berlaku	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000		Kepulauan Riau								
			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPH Unit I Karimun)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000		Karimun								
			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPH Unit II Batam)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000		Batam								
			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPH Unit III Lingga)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000		Lingga								
			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPH Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000		Bintan-Tanjungpinang								
			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPH Unit V Natuna)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000		Natuna								
			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPH Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000		Anambas								
			Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan hasil Hutan kayu	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	10.000.000		Anambas								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2021 (TAHUN BERJALAN)		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Perangka Pendanaan		
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	40.000.000	1 Paket	25.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	65.000.000	Kepulauan Riau
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTRL)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTRL)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTRL)		0 Hektar	0	0 Hektar	0	0,25 Hektar	5.000.000	0 Hektar	0	0 Hektar	0	0 Hektar	0	0,25 Hektar	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara yang terbangun		0 Hektar	0	0 Hektar	0	0,25 Hektar	5.000.000	0 Hektar	0	0 Hektar	0	0 Hektar	0	0,25 Hektar	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan		0 Hektar	0	0 Hektar	0	1 Hektar	5.000.000	1 Hektar	25.000.000	0 Hektar	0	0 Hektar	0	2 Hektar	30.000.000	Kepulauan Riau
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	5.000.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan		0 batang	0	0 batang	0	500 batang	5.000.000	0 batang	0	0 batang	0	0 batang	0	500 batang	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dikembangkan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan atas hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	Kepulauan Riau
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan		1 Tahun	1.612.001.500	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	2.052.001.500	Kepulauan Riau
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KHPH Unit I Karimun)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		0 Kali	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	5.000.000	4 Kali	45.000.000	Karimun
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		0 Kali	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	5.000.000	4 Kali	45.000.000	Batam
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KHPH Unit III Lingga)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		0 Kali	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	5.000.000	4 Kali	45.000.000	Lingga
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KHPH Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		0 Kali	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	5.000.000	4 Kali	45.000.000	Bintan-Tanjungpinang
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KHPH Unit V Natuna)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		0 Kali	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	5.000.000	4 Kali	45.000.000	Natuna
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KHPH Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		0 Kali	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	5.000.000	4 Kali	45.000.000	Anambas
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		7 Kab/Kota	468.825.200	0 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota	15.000.000	0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota	483.825.200	
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan		7 Kab/Kota	468.825.200	0 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota	15.000.000	0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota	483.825.200	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan		6 kali	544.267.100	1 kali	20.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000	0 kali	0	10 kali	614.267.100	Kepulauan Riau
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Peranggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Peranggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		6 kali	130.084.000	1 kali	20.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000	0 kali	0	10 kali	200.084.000	Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2021 (TAHUN BERJALAN)						2022			2023			2024			2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terkelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		1 Paket	1.481.917.500	0 Paket	0	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	10.000.000	0 Paket	0	1 Paket	1.531.917.500	Kepulauan Riau		
			Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Kayu Hayati	Jumlah laporan pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	10.000.000	Anambas		
			Fasilitasi Pemerintah Kombinen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UJPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan fasilitasi Pemerintah Kombinen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UJPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1 laporan	468.825.200	0 laporan	0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	0 laporan	0	3 laporan	483.825.200			
			Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah laporan pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu		1 laporan	468.825.200	0 laporan	0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	0 laporan	0	3 laporan	483.825.200			
			Pengawasian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah laporan pengawasian Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		1 laporan	544.267.100	0 laporan	0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	0 laporan	0	2 laporan	554.267.100	Kepulauan Riau		
			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah laporan pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun		1 Paket	110.401.200	1 Paket	32.379.132	1 Paket	32.379.132	1 Paket	42.256.394	1 Paket	10.000.000	0 Paket	-	1 Paket	227.415.858	Kepulauan Riau		
			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	Kepulauan Riau		
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah izin usaha atas Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun		12 Pemegang Izin	110.401.200	5 Pemegang Izin	22.379.132	3 Pemegang Izin	12.379.132	3 Pemegang Izin	22.256.394	3 Pemegang Izin	10.000.000	0 Pemegang Izin	0	5 Pemegang Izin	177.415.858	Kepulauan Riau		
			Fasilitasi Pemerintah Kombinen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UJPHBK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin baru		0 Izin Baru	0	1 Izin Baru	10.000.000	1 Izin Baru	10.000.000	1 Izin Baru	10.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Izin Baru	30.000.000	Kepulauan Riau		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat		500 Ha	787.941.800	500 Ha	81.536.493	500 Ha	184.330.575	500 Ha	267.597.549	500 Ha	195.387.819	500 Ha	215.990.185	500 Ha	1.732.784.421	Kepulauan Riau		
			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemerdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan		6 KPH	787.941.800	6 KPH	81.536.493	6 KPH	184.330.575	6 KPH	267.597.549	6 KPH	195.387.819	6 KPH	215.990.185	6 KPH	1.732.784.421	Kepulauan Riau		
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SMN Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluhan SMN Bidang Kehutanan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya		0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang	56.733.026	0 Orang	0	0 Orang	0	4 Orang	15.000.000	5 Orang	71.733.026	Kepulauan Riau		
			Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Unit III Lingga)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan		6 Kelompok Tani Hutan	300.429.000	2 Kelompok Tani Hutan	10.000.000	5 Kelompok Tani Hutan	30.000.000	7 Kelompok Tani Hutan	47.597.549	9 Kelompok Tani Hutan	55.000.000	11 Kelompok Tani Hutan	75.000.000	34 Kelompok Tani Hutan	518.026.549	Kepulauan Riau		
			Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan		0 Kelompok Tani Hutan	0	3 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	5 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	7 Kelompok Tani Hutan	15.000.000	5 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	5 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	27 Kelompok Tani Hutan	35.000.000	Karimun		
			Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Unit V Natuna)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan		0 Kelompok Tani Hutan	0	6 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	5 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	6 Kelompok Tani Hutan	15.000.000	5 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	5 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	26 Kelompok Tani Hutan	35.000.000	Batam		
			Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan		0 Kelompok Tani Hutan	0	1 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	2 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	3 Kelompok Tani Hutan	15.000.000	2 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	11 Kelompok Tani Hutan	35.000.000	Lingga				
			Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan		0 Kelompok Tani Hutan	0	8 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	8 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	8 Kelompok Tani Hutan	15.000.000	8 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	41 Kelompok Tani Hutan	35.000.000	Bintan-Tanjungpinang				
			Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Unit VI Natuna)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan		0 Kelompok Tani Hutan	0	6 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	6 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	6 Kelompok Tani Hutan	15.000.000	6 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	31 Kelompok Tani Hutan	35.000.000	Natura				
			Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Pengujian dan Pendampingan Kebelagaan		0 Kelompok Tani Hutan	0	1 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	2 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	1 Kelompok Tani Hutan	15.000.000	1 Kelompok Tani Hutan	5.000.000	6 Kelompok Tani Hutan	35.000.000	Anambas				

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		2021 (TAHUN BERJALAN)		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyelipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	6 kali	487.512.800	2 kali	11.536.493	4 kali	37.597.549	5 kali	40.000.000	6 kali	50.387.819	7 kali	65.990.185	26 kali	693.024.846	Kepulauan Riau
Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyelipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun)	0 Kali	0	5 Kali	5.000.000	5 Kali	5.000.000	15 Kali	15.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	5.000.000	45 Kali	40.000.000	Karimun
Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyelipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHL Unit II Batam)	0 Kali	0	5 Kali	5.000.000	5 Kali	5.000.000	15 Kali	15.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	5.000.000	45 Kali	40.000.000	Batam
Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyelipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga)	0 Kali	0	5 Kali	5.000.000	5 Kali	5.000.000	15 Kali	15.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	5.000.000	45 Kali	40.000.000	Lingga
Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyelipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	0 Kali	0	5 Kali	5.000.000	5 Kali	5.000.000	15 Kali	15.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	5.000.000	45 Kali	40.000.000	Bintan-Tanjungpinang
Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyelipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna)	0 Kali	0	5 Kali	5.000.000	5 Kali	5.000.000	15 Kali	15.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	5.000.000	45 Kali	40.000.000	Natuna
Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyelipan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	0 Kali	0	5 Kali	5.000.000	5 Kali	5.000.000	15 Kali	15.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	5.000.000	45 Kali	40.000.000	Anambas
Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	0	2 DAS	38.894.590	2 DAS	36.640.149	2 DAS	100.316.684	2 DAS	102.743.886	2 DAS	71.104.083	2 DAS	349.699.392	Kepulauan Riau
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota	38.894.590	1 Kab/Kota	36.640.149	1 Kab/Kota	100.316.684	1 Kab/Kota	102.743.886	1 Kab/Kota	71.104.083	1 Kab/Kota	349.699.392	Kepulauan Riau
Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan DAS	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	52.743.886	0 Laporan	0	1 Laporan	57.743.886	Kepulauan Riau
Jumlah Laporan Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	Kepulauan Riau
Jumlah lokasi yang dikonservasi	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	1 Lokasi	5.000.000	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	1 Lokasi	5.000.000	Kepulauan Riau
Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan DAS	0 Kelompok Masyarakat	0	3 Kelompok Masyarakat	38.894.590	1 Kelompok Masyarakat	5.000.000	7 Kelompok Masyarakat	50.000.000	0 Kelompok Masyarakat	0	0 Kelompok Masyarakat	0	11 Kelompok Masyarakat	93.894.590	Kepulauan Riau
Jumlah Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	5.000.000	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	5.000.000	Kepulauan Riau
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan DAS	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	11.640.149	4 Kali	50.316.684	4 Kali	50.000.000	6 Kali	71.104.083	16 Kali	183.060.916	Kepulauan Riau
		32.958.227.790		32.675.220.700		35.151.407.646		37.747.242.662		40.002.863.187		42.895.116.807		221.430.078.792	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja.

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau. Target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Indeks Kualitas Air Laut	56,60	56,70	56,80	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90
3	Indeks Kualitas Air	88,14	88,25	88,35	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	59,07	59,08	59,09	59,10	59,1	59,1	59,1	59,1
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76,1	76,75	77,39	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	0	14,28	14,28	28,57	42,58	57,14	57,14	
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	26,67	33,33	33,33	40,00	40,00	46,67	46,67	
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	28,57	42,85	57,14	71,43	85,71	85,71	85,71	
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	85,71	
12	Persentase Pengurangan Sampah	24	25	26	27	28	30	30	30
13	Persentase Penanganan Sampah	74	73	72	71	70	70	70	70
14	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	27,00	27,10	27,2	27,3	27,4	27,5	27,5	
15	Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	5	5	10	10	10	10	10	50
16	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (Ha)	500	500	500	500	500	500	500	500
17	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (DAS)	2	2	2	2	2	2	2	2

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Akhir RPJMD				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,47	69,73	69,95	70,18	70,28	70,38
2	PDRB Sektor Kehutanan	PDRB Sektor Kehutanan terhadap PDRB Harga berlaku	Miliar rupiah	27,00	27,10	27,20	27,30	27,40	27,50

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja. Untuk itu perlu disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan beberapa upaya diantaranya; **pertama** perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan baik.

Tahap yang **kedua** perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras untuk pencapaian target kinerja kegiatan. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh aparatur yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai satuan organisasi

perangkat daerah (OPD) yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara optimal dan terpadu.